

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hanya karena penyertaan-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2022 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Ambon selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon lebih terarah dan terukur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja ini demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dalam peningkatan akses Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Ambon.

Ambon,     Agustus 2021  
**Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Persandian Kota Ambon**

**Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19770320 199511 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja-OPD).

Rencana Kerja-OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementrian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan OPD. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyusun Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian guna menyusun rencana kerja yang berupa program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas. Dengan begitu baik program maupun kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik nantinya.

### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2022 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun perencanaan pembangunan di daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-203; dan
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2022 Kota Ambon, adalah :

#### **A. Maksud**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2020 bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, sesuai dengan Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2022.

#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2022 yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk menyusun program dan kegiatan tahunan;

2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022, secara garis besar disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU (TAHUN 2020)**

Bab ini memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD (RENSTRA KONDISI 2022)**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (RKPD 2022)**

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan serta Indikator Kinerja yang berisi program dan kegiatan Tahun 2022.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**  
**TAHUN LALU (TAHUN 2020)**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi melalui:
  - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 bulan;
  - 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target 7 orang;
  - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target 1 orang;
  - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 35 jenis;
  - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target fotocopy sebanyak 35663 lembar dan penjiilidan sebanyak 48 dokumen;
  - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 8 jenis;
  - 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dengan target 12 koran;
  - 1.8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dengan target 2 kali perjalanan;
  - 1.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan target 19 OPD di luar Balai Kota.
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi melalui:
  - 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 4 jenis barang;
  - 2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target 10 jenis peralatan;
  - 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan target 3 unit;
  - 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 9 jenis peralatan;
  - 2.5. Pengadaan Mebeleur dan Interior Ruang Command Center dengan target 8 item.

- III. Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terealisasi melalui:
  - 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 3 laporan.
- IV. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Medi Massa, terealisasi melalui:
  - 4.1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pengadaan dan Pemasangan CCTV dan Perangkat Pendukung) dengan target 32 unit;
  - 4.2. Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Kelurahan dengan target 8 kelurahan;
  - 4.3. Pembangunan Aplikasi SIMPEG dengan target 1 aplikasi;
  - 4.4. Pengadaan Perangkat TIK Ruang Command Center dengan target 13 item peralatan, 2 item mebeleur dan jasa pemasangan;
- V. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, terealisasi melalui:
  - 5.1. Pembentukan dan Pembinaan dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan target terbentuknya Dewan TIK;
- VI. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, terealisasi melalui:
  - 6.1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target liputan kegiatan Pemerintah Kota Ambon dan feature 100%;
  - 6.2. Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintah Daerah dan Publik dengan target kerjasama dengan 13 media.
- VII. Program Optimalisasi Teknologi Informasi, terealisasi melalui:
  - 7.1. Layanan Informasi Publik dengan target Layanan Kehumasan berupa dokumentasi dan publikasi 100%.
- VIII. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, terealisasi melalui:
  - 8.1. Pengumpulan, Evaluasi dan Analisis Layanan Statistik Sektoral denga target 45 buku statistic sektoral Pemerintah Kota Ambon;

## **2.2. KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kota di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika dan persandian.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, terdiri atas:

- a) Sekretariat;
- b) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c) Bidang Teknologi Informasi Persandian dan Statistik; dan
- d) Bidang Penyelenggaraan *e-Government*.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon adalah pelayanan informasi meliputi website, SIMANTAP, kotak informasi, infrastruktur jaringan, pengaduan masyarakat, vidiotron dan pajak online.

### **a. Pelayanan melalui Website**

Informasi merupakan hal yang penting sekarang ini dan informasi dapat didapat melalui surat kabar maupun internet dengan kemajuan teknologi maka informasi sekarang ini banyak ditampilkan lewat internet, untuk itu Pemerintah Kota Ambon menyediakan informasi melalui website, informasi yang dimuat dalam website meliputi berita-berita kegiatan Pemerintah Kota Ambon, ekonomi, industri, pariwisata, iklim dan cuaca dengan informasi ini maka masyarakat Kota Ambon dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di Kota Ambon.

**b. Pelayanan melalui SIMANTAP**

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi sorotan utama dari pemerintah karena masyarakat menuntut dari pemerintah untuk melakukan pelayanan prima, transparan dan cepat, untuk itu Pemerintah Kota Ambon menyediakan Pelayanan SIMANTAP untuk melaksanakan pelayanan yang prima, transparan dan cepat kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dalam menyelesaikan pelayanan. Pelayanan yang tersedia pada Pelayanan SIMANTAP berupa pelayanan perijinan SITU, SIUP, TDP, Ijin Trayek, IMB dan izin Gangguan.

**c. Pelayanan melalui Data Pemberdayaan**

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon menyediakan pelayanan Data Pemberdayaan, dalam hal ini dalam Data Pemberdayaan tersedia data-data pemberdayaan dari OPD pemberdayaan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh data-data pemberdayaan dengan cepat dan akurat.

**d. Pelayanan Infrastruktur Jaringan**

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat, maka informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui internet dan informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pegawai lingkup Pemerintah Kota Ambon dan masyarakat Kota Ambon, untuk itu Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyediakan layanan internet pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam dan luar Balai Kota dan area-area publik yaitu taman karpan, taman nusaniwe dan pattimura park.

**e. Pelayanan Pengaduan Masyarakat**

Untuk mengikut sertakan masyarakat dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kota Ambon maka melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyediakan layanan pengaduan masyarakat dengan cara menyediakan layanan e-lapor yang dapat digunakan masyarakat dan pegawai untuk dapat melaporkan atau memberitahukan pembangunan untuk masyarakat yang tidak layak atau sudah rusak untuk dapat ditindak lanjuti langsung kepada Bapak Presiden melalui Staf kepresidenan, sedangkan layanan SMS pengaduan untuk membantu masyarakat Kota Ambon untuk menyampaikan pembangunan di tempat tinggal yang tidak layak untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon.

**f. Pelayanan Videotron**

Untuk memberikan informasi tentang pendapatan daerah lewat pembayaran pajak dan retribusi pada dinas pendapatan daerah, maka melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah melakukan pelayanan vidiotron untuk dapat menampilkan besarnya jumlah pendapatan per bulan yang dapat dilihat oleh masyarakat.



**g. Pelayanan Pajak Online**

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendapatan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon telah mengembangkan pelayanan pajak online dengan membuat aplikasi pajak online dan bekerjasama dengan PT. Bank Maluku Cabang Ambon yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak secara online pada ATM Bank Maluku Cabang Ambon.

**h. Pelayanan PPID**

PPID Kota Ambon dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Ambon yang kemudian diubah melalui SK Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur organisasi pemerintahan daerah. Meskipun terdapat beberapa persoalan teknis, namun PPID Kota Ambon masih melakukan fungsinya secara baik. Hal ini tercermin dari beberapa hal, antara lain: Tersedianya data awal/ profil OPD pada <http://ppid.ambon.go.id/> dan website [ambon.go.id](http://ambon.go.id); Melayani pemohon informasi dengan standar pelayanan minimal; Melayani masalah pemohon informasi sesuai prosedur bersama PPID pembantu terkait permintaan data informasi; Semua jenis pelayanan dilakukan dengan baik secara lisan maupun tertulis.

**i. Pelayanan Publikasi**

Dengan tersedianya media publikasi seperti Website Pemerintah daerah [ambon.go.id](http://ambon.go.id), Media Center, Majalah TABEA, Media Siosial Diskominfo Kota Ambon ( facebook, instagram, twitter, youtube) serta media organisasi seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah PPID, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan terbuka serta diharapkan mampu menciptakan kemitraan dengan insan pers dan lembaga masyarakat lainnya sehingga terjalin komunikasi dua arah yang lebih komunikatif.

**2.3. PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**

Pembangunan Kota Ambon pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat menuju kemandirian. Dalam konsep pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan upaya untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinamisnya kehidupan masyarakat Kota Ambon serta terus meningkatnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Di sisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Ambon dituntut untuk dapat terus meningkatkan pembangunan pada seluruh aspek guna peningkatan harmonisasi sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan yang berkembang dalam :

#### **Urusan Statistik**

Salah satu hal urgen dalam pembangunan adalah tersediaan data dan informasi yang akurat untuk kebutuhan perencanaan kota. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Ambon dalam urusan data statistic antara lain adalah Kuantitas akurasi data sektoral dari SKPD yang masih kurang konsisten, dan masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan, serta masih belum optimalnya sistem informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan kota.

#### **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Bidang komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam pergaulan antar negara di zaman globalisasi. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Adapun Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Ambon secara umum adalah, pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh fasilitas umum Kota Ambon guna mendukung *Smart City*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan *public*, (*e-goverment*, *e-city*, *e-planning*, *e-budgeting*, dll) belum dikembangkan guna mendukung *Ambon Smart City*.

### **2.4. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Adapun Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon :

#### **Urusan Statistik**

- Akurasi data base pembangunan
- Unifikasi dan kodifikasi data

#### **Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Keterbukaan Informasi Publik
- Perkembangan Teknologi Informatika (*E-Gov* dan *E-city*)
- Keamanan Siber dan Berita Hoax
- Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN OPD (RENSTRA KONDISI 2022)

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2017-2022, menetapkan Visi, yaitu: **“AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**. Untuk menjabarkan Visi dimaksud, maka dilakukan empat misi, yaitu :

1. Memperkuat dan Mempererat Harmonisasi Sosial
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Memberdayakan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Menuju Kemandirian yang Kreatif Berbasis Sumber Daya Alam yang Tersedia
4. Meningkatkan Nilai-Nilai Spiritualitas Masyarakat

Dalam penjabaran Visi Kota Ambon tahun 2017-2022, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon melaksanakan **Misi 1**, yaitu : **Memperkuat dan Mempererat Harmonisasi Sosial**.

Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kota Ambon sesuai RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 di atas adalah :

##### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Komunikasi Informasi persandian dan Statistik Kota Ambon.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon periode tahun 2017–2022 adalah **Terwujudnya Harmonisasi Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Bertoleransi dan Memiliki Kompetensi Yang Tinggi**.

##### B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon periode Tahun 2017 – 2022, adalah :

1. Meningkatkan dan Menerapkan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Ambon Sesuai Asas-asas Keterbukaan;

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon mengacu pada Renstra, Kondisi Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target			
				2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Harmonisasi Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Bertoleransi dan Memiliki Kompetensi Yang Tinggi	Meningkatnya dan menerapkan sistem komunikasi dan informasi Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan asas-asas keterbukaan	Keterbukaan Informasi Publik	%	30	50	60	65

Adapun Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja  
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon**

Indikator	Satuan	Target				Realisasi Capaian			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Keterbukaan Informasi Publik	%	20	30	50	60	21,42	33,33	33,33	59.52

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Rumus Perhitungan
Meningkatnya dan menerapkan sistem komunikasi dan informasi pemerintah Kota Ambon sesuai dengan asas-asas keterbukaan	Keterbukaan informasi publik pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki Website-Aplikasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$

**Perangkat Daerah Yang Memiliki Website-Aplikasi:**

- 1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian - ambon.go.id; boxinfo.ambon.go.id; e-surat/sms pengaduan; GIS (Geographi Information System); LAPOR SP4N; DIGITAL SIGNATURE; SIMDATIK (Sistem Informasi Manajemen Data Statistik); SIM-COVID
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa - dpppamd.ambon.go.id
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu - dpmpstp.ambon.go.id; SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu)
- 4) Dinas Pendidikan - disdik.ambon.go.id; dapodik

- 5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - [dpkp.ambon.go.id](http://dpkp.ambon.go.id)
- 6) Dinas Sosial - SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial)
- 7) Dinas Tenaga Kerja - Register Biometrik CTKI
- 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan - [dlhp.ambon.go.id](http://dlhp.ambon.go.id)
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - [dukcapilambon.online](http://dukcapilambon.online); SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan); SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan)
- 10) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - [www.visitambon.go.id](http://www.visitambon.go.id); Pariwisata Ambon Music Office (AMO)
- 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - iAmbonManise; KUNANG KUNANG; INLISLITE
- 12) Dinas Kesehatan - SIKDA GENERIK
- 13) Satuan Polisi Pamong Praja - [satpolpp.ambon.go.id](http://satpolpp.ambon.go.id); SIMPAPEDA
- 14) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - [bpkad.ambon.go.id](http://bpkad.ambon.go.id); e-planning; e-procurement; e-monev; SIMDA
- 15) Badan Penanggulangan Bencana - [bppd.ambon.go.id](http://bppd.ambon.go.id)
- 16) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah - e-planev (e-Planning, Monev)
- 17) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - [bpprd.ambon.go.id](http://bpprd.ambon.go.id); SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah); SISMIOP PBB; E-SPTPD; E-Layanan; E-Potensi
- 18) Bagian Hukum - [jdih.ambon.go.id](http://jdih.ambon.go.id)
- 19) Bagian Organisasi dan Tata Laksana - SEMPE KASN; SIM ANJAB-ABK; E-SAKIP
- 20) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - SIRUP; SPSE
- 21) Kecamatan Sirimau - [sirimau.ambon.go.id](http://sirimau.ambon.go.id)
- 22) Kecamatan Nusaniwe - [nusaniwe.ambon.go.id](http://nusaniwe.ambon.go.id)

23) Kecamatan Leitimur Selatan - [leitimurselatan.ambon.go.id](http://leitimurselatan.ambon.go.id)

24) Kecamatan Teluk Ambon Baguala - [telukambonbaguala.ambon.go.id](http://telukambonbaguala.ambon.go.id)

25) Kecamatan Teluk Ambon - [telukambon.ambon.go.id](http://telukambon.ambon.go.id)



### **3.2. PROGRAM – KEGIATAN - SUB KEGIATAN**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

##### **1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

##### **1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :**

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

##### **1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

##### **1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :**

- 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor.

#### **II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

##### **2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :**

- 1) Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- 2) Pelayanan Informasi Publik;
- 3) Layanan Hubungan Media

#### **III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

##### **3.1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**

- 1) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik;
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

#### **IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

##### **4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Deseminasi Data Statistik Sektoral.

#### **V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN**

##### **5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah, dengan sub kegiatan :**

- 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
- 2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (RKPD 2022)**

Berkaca pada tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2021 sebagaimana termuat pada bab sebelumnya, maka disusun rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022 merupakan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022, yang berisi pula prakiraan maju rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon .

Adapun uraian rencana program-kegiatan-sub kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022 sebagaimana pada tabel 4.1. berikut ini :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika.

Semoga Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ambon,     Agustus 2021  
**Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Persandian Kota Ambon**

**Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19770320 199511 1 001**





PEMERINTAH KOTA AMBON  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 Telp. (0911) 345289 Fax. (0911) 343969 Website: [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

PROGRAM DAN KEGIATAN  
KOTA AMBON  
TAHUN 2022

Unit Organisasi : 2.10.02 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian  
Sub Unit Organisasi : 2.10.02.01 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																
						Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)													
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target														
1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															2,290,000,000					2,519,000,000						
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															2,290,000,000					2,519,000,000						
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															2,290,000,000					2,519,000,000						
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Meningkatnya kerjasama dengan media massa	Terlaksananya publikasi kegiatan pemkot ambon	Tersebar nya informasi kegiatan pemkot ambon di masyarakat	Masyarakat	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya publikasi kegiatan pemkot ambon	tersebar nya informasi kegiatan pemkot ambon di masyarakat	170,000,000	APBD		2 Media	100%	187,000,000													
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Layanan kehumasan dalam pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya layanan kehumasan	Tersediannya dokumentasi dan publikasi	Masy/Pihak ketiga	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya layanan kehumasan	Tersediannya dokumentasi dan publikasi	670,000,000	APBD		1 Paket	100%	737,000,000													
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Meningkatnya kerjasama dengan media massa	Terlaksananya publikasi kegiatan pemkot ambon	tersebar nya informasi kegiatan pemkot ambon di masyarakat	Masyarakat	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya publikasi kegiatan pemkot ambon	tersebar nya informasi kegiatan pemkot ambon di masyarakat	1,450,000,000	APBD		12 media	100%	1,595,000,000													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															562,000,000					618,200,000						
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA															562,000,000					618,200,000						
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															562,000,000					618,200,000						
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Terlaksananya pemanfaatan TIK	Jumlah Aplikasi Pemerintah Kota Ambon	Tersedianya Aplikasi Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Ambon	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Website-Aplikasi Pemerintah Kota Ambon	Tersedianya Aplikasi Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100,000,000	APBD		3 aplikasi	100%	110,000,000													
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Pembangunan Smart RT/RW	Implementasi program Smart City dan Tersedianya internet pada 2 lokasi area publik di 50 desa/kelurahan	Tercapainya haisl penilaian Evaluasi Mandiri Smart 100 Smart City yang lebih baik	Kota Ambon	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Evaluasi Mandiri Implementasi Program Gerakan Menuju Smart City	Tercapainya haisl penilaian Evaluasi Mandiri Smart 100 Smart City yang lebih baik	62,000,000	APBD		1 keg	100%	68,200,000													
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan sumber daya TIK	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pengadaan dan Pemasangan CCTV dan Perangkat Pendukung)	Tersedianya Perangkat CCTV	Kota Ambon dan luar daerah	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pengadaan dan Pemasangan CCTV dan Perangkat Pendukung)	Tersedianya Perangkat CCTV	400,000,000	APBD		1 Paket	100%	440,000,000													
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															52,000,000					57,200,000						
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															52,000,000					57,200,000						
2	20	02	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															52,000,000					57,200,000						
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksana Sinkroniasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik sektoral	Buku Statistik Sektoral Kota Ambon	Terintegrasinya Data Sektoral Lingkup Pemerintah Kota Ambon	OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Sektoral Lingkup Pemerintah Kota Ambon	Buku Data Sektoral Lingkup Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021	52,000,000	APBD		45 Buku.	100%	57,200,000													

					Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021	Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
--	--	--	--	--	----------------------	-------------------	--------------------	---------	-----------------------------------

Kode				Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1									2	3	4				5	6		7	8
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								225,000,000					247,500,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								225,000,000						247,500,000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								225,000,000						247,500,000
1	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya pengamanan informasi berbasis elektronik	Pengadaan Sertifikat SSL untuk website dan Aplikasi milik Pemkot	Tersedianya Sertifikat SSL untuk pengamanan website dan aplikasi	Diskominfo dan Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengadaan Sertifikat SSL untuk website dan Aplikasi milik Pemkot	Tersedianya Sertifikat SSL untuk pengamanan website dan aplikasi	75,000,000	APBD			100%	82,500,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Kemanan Informasi	Pengadaan Jammer	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Diskominfo dan Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Pengadaan Jammer	150,000,000	APBD			100%	165,000,000	
JUMLAH													10,931,050,000						12,105,205,000

Ambon, Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

Drs. Joy R. Adriaansz, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19770320 199511 1 001